



Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik Aceh Selatan

M. Mochtar Mas'od¹ Yunita Dwi Mandasari² Fatimah³ Muhammad Haris⁴ Ahmad Maulana Anshori⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Madiun

² Universitas Bhayangkara, Surabaya

³ UIN Ar-Raniry Aceh

⁴ Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

⁵ Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

*Correspondence Email: haris@diniyah.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment through Gampong-Owned Enterprises (BUMG) has become an important strategy in efforts to improve village welfare and independence. This research aims to evaluate the implementation of community empowerment policies by the Sapik Gampong-Owned Enterprise (BUMG) in South Aceh, as an integral part of grassroots community empowerment efforts. The method used in this research is descriptive qualitative which focuses on describing the phenomenon of implementing community empowerment in the field. The data collection process was carried out through interviews, observation and documentation. The research results show that the main obstacles lie in the lack of facilities and infrastructure, limited funds, and minimal participation from communities who still follow primitive thought patterns. Evaluation was carried out using William N Dunn's theoretical framework which includes effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The biggest obstacle was identified as limited financial resources, followed by Human Resources (HR) problems.

Keywords: Evaluation, Policy, Community Empowerment, Gampong-Owned Enterprises (BUMG)

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) telah menjadi strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik di Aceh Selatan, sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat dengan akar rumput. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada gambaran fenomena implementasi pemberdayaan masyarakat di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan dana, serta minimnya partisipasi masyarakat yang masih mengikuti pola pikir primitif. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan kerangka teoritis William N Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kendala

terbesar teridentifikasi pada keterbatasan sumber daya finansial, diikuti oleh permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Gampong

PENDAHULUAN

Menurut peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang gampong, terdapat ketentuan pada Pasal 87 Ayat 1 yang mewajibkan setiap gampong untuk membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)¹. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mengatasi masalah kemiskinan. BUMG, yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan gampong, diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik. Regulasi serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal. Selanjutnya, pemerintah gampong memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong². Dalam konteks ini, BUMG Sapik, yang telah aktif beroperasi selama lebih dari 4 tahun di Gampong Sapik, menjadi salah satu contoh implementasi BUMG yang telah dijalankan oleh pemerintah gampong.

Pendirian BUMG Sapik didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh gampong tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi

signifikan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan gampong secara keseluruhan. Pemilihan BUMG Sapik sebagai objek penelitian bukan tanpa alasan. BUMG Sapik dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan unit ekonomi yang sedang mengalami perkembangan pesat. Hal ini menjadi perhatian utama penelitian untuk lebih mendalam memahami kontribusi serta peran yang dimainkan oleh BUMG Sapik dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat gampong.

Fokus penelitian ini adalah melakukan eksplorasi mendalam terkait potensi dan peran BUMG Sapik sebagai model BUMG yang tengah berkembang di konteks gampong. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkapkan dinamika, tantangan, dan potensi yang dihadapi oleh BUMG Sapik dalam menjalankan fungsi pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan potensi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik sebagai agen pembangunan ekonomi di tingkat gampong.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan memberdayakan mereka dengan menggali potensi dan

¹ Supardi, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)* (Jakarta: UAI Press, 2019).

² Hanny Purnamasari and Rachmat Ramdani, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 2 (2019): 136–149.

kemampuan yang dimiliki³⁴. Pemberdayaan bertujuan membentuk individu dan masyarakat agar mampu mandiri⁵. Pendekatan dalam pemberdayaan menekankan partisipasi masyarakat, dengan esensi agar mereka dapat terlibat aktif dalam mengarahkan kegiatan terkait program pemberdayaan⁶. Mekanisme pemberdayaan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan ekonomi masyarakat melalui sebuah lembaga yang profesional⁷, dan berdasarkan potensi sumber daya asli dari gampong.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa gampong diwajibkan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mengatasi kemiskinan. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDesa/BUMG dari Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal. Pemerintah gampong diwajibkan untuk membuat dan mengatur Peraturan Daerah (Perda) terkait Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG.

Sebagai ilustrasi, BUMG Sapik telah berjalan lebih dari 4 tahun di Gampong Sapik. Pembentukan BUMG Sapik oleh Pemerintah Gampong didasarkan pada kebutuhan dan potensi gampong, dengan harapan meningkatkan pendapatan masyarakat dan gampong secara keseluruhan. Pemilihan BUMG Sapik

sebagai subjek penelitian didasarkan pada fakta bahwa itu merupakan unit ekonomi yang sedang tumbuh. BUMG Sapik didirikan secara resmi pada 22 Oktober 2018, diprakarsai oleh Kepala Gampong (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Gampong dengan kerjasama dari Pemerintah Gampong. Proses pembentukan BUMG Sapik kemudian diresmikan melalui penetapan dalam Peraturan Gampong (PerGam).

BUMG Sapik menjalankan program bisnis yang melibatkan beberapa unit dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah program pariwisata yang mengharuskan partisipasi aktif warga gampong untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, program kedua fokus pada penyewaan alat musik untuk acara pesta. Meskipun BUMG Sapik telah berjalan selama lebih dari 4 tahun, keberadaannya belum sepenuhnya mampu memenuhi dan meningkatkan pendapatan gampong. Kendala utamanya adalah minimnya sumber dana dan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan konkret berupa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) melalui implementasi pelatihan kepada pengurus BUMG. Pelatihan ini diberikan sebelum pengurus BUMG terlibat langsung di lapangan, dengan persyaratan latar belakang pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SLTA). Meskipun demikian, di lapangan, kinerja pengurus

³ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung (Jakarta: PT Refika Aditama, 2009) h. 76

⁴ Yefni Yefni, Muhammad Haris, and Riski Umi Pratiwi, "PEMBERDAYAAN KAWASAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KOTA PEKANBARU," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 4, no. 2 (n.d.): 61–73.

⁵ Muhammad Haris, "Problematisa Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (2019): 46–63.

⁶ Ibid.

⁷ Muhammad Haris, Alifiya Putri, and Moralely Hendrayani, "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)," *Dakwatul Islam* 8, no. 1 (2023): 24–38.

BUMG terbukti belum optimal. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya berhasil, karena masih ada warga yang enggan berpartisipasi dalam program BUMG.

Tidak hanya didasari oleh kendala pengurus BUMG, namun juga oleh persepsi masyarakat yang masih menganggap BUMG sebagai milik pemerintah dan keuntungannya hanya untuk pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pitana⁸ pemberdayaan melibatkan berbagai macam upaya, termasuk memberdayakan, memotivasi, mendidik, mendorong, melindungi, memberdayakan, memberikan kesempatan bagi setiap orang, dan mendevelopkan⁹. Kurangnya inisiatif dari pengurus BUMG dalam memberikan motivasi, edukasi, dan dorongan turut berkontribusi pada minimnya partisipasi masyarakat. Kedua hal tersebut menjadi factor penting yang saling melengkapi dalam berhasilnya pemberdayaan di dalam masyarakat.

Maka, dibutuhkan tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat. Ini sesuai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan lebih banyak warga memiliki sikap terbuka dan mau terlibat dalam program BUMG. Langkah-langkah ini melibatkan strategi lebih efektif dalam memberikan edukasi, motivasi, dan dukungan kepada masyarakat, sehingga tercipta kesadaran dan partisipasi yang lebih besar dalam menjalankan program-program pemberdayaan yang telah digagas oleh

BUMG Sapik. Diperlukan sinergi antara pengurus BUMG dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dalam berbagai program yang dicanangkan. Dukungan dari Pemerintah Gampong juga sangat krusial dalam memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung keberlanjutan program BUMG Sapik. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kegiatan BUMG Sapik. Hal ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap BUMG sebagai lembaga yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan gampong.

Komunikasi yang efektif antara BUMG Sapik, Pemerintah Gampong, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, manfaat, dan dampak dari program pemberdayaan yang dijalankan oleh BUMG Sapik. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, BUMG Sapik dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat gampong. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab BUMG Sapik semata, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif dan pemahaman dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berdampak positif untuk waktu yang cukup lama¹⁰.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, teridentifikasi dua

⁸ I Gde Pitana, *Pemberdayaan Dan Hiperdemokrasi Dalam Pembangunan Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2011).

⁹ Muhammad Haris, Alifiya Putri, and Moralely Hendrayani, "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)," *Dakwatul Islam* 8, no. 1 (2023): 24–38.

¹⁰ Muhammad Haris, Ananda Refiona Adilah, and Bayu Indra Laksana, "TIGA STRATEGI KOMUNITAS GENKOMPAK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING GENERASI MUDA," *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2023): 123–133.

permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik. Pertama, permasalahan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua, terdapat kendala dalam mengatasi keterbatasan sumber dana yang menjadi hambatan bagi perkembangan sarana prasarana pendukung program BUMG Sapik. Penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, meningkatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat, sehingga BUMG dapat lebih efektif melibatkan warga Gampong. Kedua, mengatasi kekurangan dana yang menjadi hambatan dalam pengembangan sarana prasarana yang mendukung keberlangsungan program BUMG. Metode penelitian ini mengungkap pendekatan partisipatif, yang berfokus pada peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan dan pengembangan program BUMG. Pendekatan ini sejalan dengan teori Anderson¹¹ yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan umumnya melibatkan estimasi atau penilaian terhadap substansi, implementasi, dan dampak kebijakan tersebut.

Dalam konteks BUMG Sapik, penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas BUMG melalui pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari para pemangku kepentingan, baik itu pengurus BUMG maupun masyarakat gampong. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait implementasi

program dan kegiatan BUMG. Observasi dilakukan untuk memahami situasi lapangan secara lebih mendalam. Melalui pendekatan partisipatif dan pengumpulan data yang holistik, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh BUMG Sapik. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif pada peningkatan partisipasi masyarakat serta penanganan keterbatasan sumber daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif¹² untuk mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Sapik, Aceh Selatan. Penelitian dilakukan pada waktu sebelumnya dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling^{13,14}. Informan yang terlibat dalam penelitian ini termasuk Kepala Gampong, Direktur BUMG, Kepala Bidang Pariwisata dan Sewa Alat Musik, serta beberapa warga gampong yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti¹⁵. Proses pengumpulan data tidak hanya terbatas pada wawancara, melainkan juga melibatkan observasi langsung dan

¹¹ Budi Winarmo, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009).

¹⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Jakarta: Referensi, 2013); Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁵ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 6th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

dokumentasi¹⁶ guna mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMG di Gampong Sapik. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami konteks secara mendalam, menggali persepsi, dan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan pemberdayaan yang telah dijalankan oleh BUMG.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan reduksi data, diikuti dengan penyajian data secara sistematis, dan akhirnya, penarikan kesimpulan¹⁷. Melalui langkah-langkah ini, peneliti berupaya mengenali pola-pola temuan, menganalisis hubungan antarvariabel, dan menyajikan temuan secara jelas¹⁸. Metode kualitatif deskriptif digunakan^{19,20} agar penelitian dapat menyajikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMG di Gampong Sapik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMG dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Gampong Sapik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, dampaknya terhadap masyarakat, dan sejauh mana tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

Wawancara dengan Kepala Gampong memberikan perspektif tentang pandangan pemerintah gampong terhadap kebijakan pemberdayaan. Direktur BUMG memberikan wawasan mendalam tentang strategi dan implementasi program yang dijalankan oleh BUMG. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata dan Sewa Alat Musik memberikan perspektif spesifik terkait dengan program pariwisata dan penyewaan alat musik yang dijalankan oleh BUMG. Melibatkan masyarakat gampong dalam wawancara juga memberikan sudut pandang dari penerima manfaat langsung dari kebijakan pemberdayaan.

Observasi langsung dan dokumentasi menjadi penting dalam menambah kedalaman analisis. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan, respon masyarakat, dan dinamika yang terjadi di lapangan. Sementara itu, dokumentasi memberikan data historis dan informasi mendalam terkait dengan proses pengambilan keputusan, perubahan kebijakan, dan catatan keberhasilan atau kegagalan yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui wawancara atau observasi saja. Hasil analisis data nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan dampak kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh BUMG di Gampong Sapik. Kesimpulan yang diambil akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong. Dengan

¹⁶ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006).

¹⁸ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian

Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademis melainkan juga dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah gampong dan lembaga terkait dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik, yang terletak di Gampong Sapik, Aceh Selatan. Dunn²¹ mengemukakan sejumlah kriteria evaluasi yang menjadi landasan penelitian ini. Kriteria tersebut melibatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam konteks kebijakan yang diimplementasikan oleh BUMG Sapik.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, efektivitas menjadi salah satu fokus utama. Dunn mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, BUMG Sapik perlu menilai sejauh mana program-program yang mereka jalankan telah memberikan dampak positif dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Gampong Sapik. Evaluasi ini mencakup analisis dampak finansial, sosial, dan ekonomi dari program-program BUMG.

Efisiensi adalah kriteria berikutnya yang perlu dievaluasi. Efisiensi mengacu pada jumlah usaha yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, BUMG Sapik harus mengevaluasi sejauh mana sumber daya yang digunakan proporsional dengan hasil yang dicapai.

Pemetaan sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga kerja, menjadi kunci dalam menilai sejauh mana BUMG Sapik dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling efisien.

Kecukupan menjadi aspek penting lainnya dalam evaluasi kebijakan. Kecukupan mengarah pada sejauh mana pencapaian hasil dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam konteks BUMG Sapik, evaluasi ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana program-program mereka relevan dengan kebutuhan dan masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat Gampong Sapik. Aspek ini dapat dikatakan menjadi aspek yang dapat melihat sejauh mana hasil yang sudah ada menjadi hal kongkrit yang menyentuh hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat gampong.

Pemerataan atau kesetaraan adalah kriteria yang tidak boleh diabaikan dalam evaluasi kebijakan. Pemerataan menilai distribusi pelayanan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. BUMG Sapik harus memastikan bahwa program-program mereka bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi, sehingga manfaatnya merata di antara seluruh warga gampong. Responsivitas menjadi kriteria lain yang sangat relevan dalam konteks kebijakan BUMG Sapik. Responsivitas mengarah pada sejauh mana kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Pemahaman BUMG Sapik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat responsivitas kebijakan yang diimplementasikan²².

Ketepatan merupakan kriteria terakhir dalam mengevaluasi kebijakan

²¹ William N Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) h. 610

²² Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

BUMG Sapik, yang mengacu pada kesesuaian nilai atau harga dari tujuan-tujuan program. Dalam konteks ini, BUMG Sapik perlu menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Gampong Sapik.

Dalam mengevaluasi aspek-aspek ini, BUMG Sapik perlu melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan partisipatif dapat membantu BUMG Sapik mendapatkan masukan yang lebih akurat dan memahami perspektif langsung dari warga gampong. Langkah ini akan meningkatkan validitas dan keberlanjutan kebijakan yang diimplementasikan oleh BUMG Sapik. Dengan merinci dan menjelaskan setiap kriteria evaluasi, BUMG Sapik dapat memahami keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat mereka. Evaluasi yang cermat dan komprehensif akan menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan, sehingga BUMG Sapik dapat terus berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gampong Sapik.

Efektivitas (effectiveness)

Evaluasi efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat, terutama yang diimplementasikan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Sapik, Aceh Selatan, menjadi hal yang krusial. Efektivitas ini umumnya diukur dari tingkat pelayanan yang diberikan dan sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dunn²³ menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan berkaitan dengan pencapaian hasil yang diharapkan atau

tujuan dari kebijakan tersebut. Saat ini, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMG di Gampong Sapik terbilang cukup baik.

Hal ini terbukti dari pemahaman yang baik dari organisasi pelaksana, khususnya pengurus BUMG, mengenai peran BUMG dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pemahaman ini terlihat dalam upaya sosialisasi yang dilakukan secara teratur oleh setiap pengurus BUMG yang bertanggung jawab. Sosialisasi tersebut berjalan dengan baik dan efektif, di mana setiap pengurus BUMG memiliki keterampilan yang baik dalam memahami dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama melalui kegiatan sosialisasi di balai gampong.

Dalam konteks kebijakan pemberdayaan masyarakat, efektivitas sejauh mana hasil yang diharapkan dapat tercapai. Dari hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh BUMG berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Masyarakat yang awalnya kurang mengenal BUMG menjadi lebih tahu dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan oleh BUMG. Hal ini berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat setelah adanya BUMG.

Efektivitas dalam hal penyampaian informasi menjadi kunci dalam menilai sejauh mana kebijakan pemberdayaan masyarakat telah mencapai hasil yang diinginkan²⁴. Organisasi pelaksana, dalam hal ini BUMG, telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memberikan informasi kepada kelompok sasaran. Sosialisasi yang dilakukan secara

²³ Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*.

²⁴ M Mochtar Mas'od et al., "EFEKTIFITAS KOMUNIKASI PNPM MANDIRI DENGAN PEMANFATAN KEARIFAN LOKAL DALAM

PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PADANG," *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 8 (2023): 262–282.

teratur membantu masyarakat memahami apa itu BUMG, program-program yang ada, syarat-syarat yang harus dipenuhi, manfaat, dan tujuan didirikannya BUMG²⁵. Keberhasilan sosialisasi juga dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program-program BUMG menandakan adanya hasil yang positif dari kebijakan pemberdayaan yang diimplementasikan. Keberhasilan ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui penerapan kebijakan tersebut. Dalam konteks BUMG Sapik, penilaian efektivitas sebaiknya meliputi berbagai aspek, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat, partisipasi dalam program BUMG, dan tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang BUMG.

Hal ini menjadi relevan karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memahami, menerima, dan aktif berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan. Dengan adanya pemahaman dan partisipasi yang tinggi, tujuan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat lebih mudah tercapai. Oleh karena itu, BUMG Sapik perlu terus meningkatkan upaya sosialisasi dan komunikasi agar masyarakat semakin terlibat dan memahami secara menyeluruh mengenai peran serta manfaat dari BUMG. Efektivitas kebijakan dapat diperkuat melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pemberdayaan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, BUMG Sapik

dapat mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih akurat. Keterlibatan ini akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Gampong Sapik. Dengan begitu, kebijakan pemberdayaan yang diimplementasikan oleh BUMG Sapik akan semakin efektif dan relevan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Efisiensi (efficiency)

Dunn²⁶ menyatakan bahwa efisiensi sering dianggap sebagai bentuk rasionalitas ekonomi, di mana hubungan antara efektivitas dan upaya sering diukur dalam nilai moneter. Efisiensi sering dihubungkan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Fokus utama dalam penilaian efisiensi melibatkan evaluasi sumber daya dan dana, dimana kedua elemen tersebut menjadi kunci dalam menilai sejauh mana sebuah kebijakan atau program dapat dijalankan secara efisien. Pertimbangan terhadap efisiensi menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan dana yang memadai. Kedua aspek ini memiliki peran penting, karena SDM yang optimal dan alokasi dana yang tepat akan mendukung efisiensi dalam mencapai tujuan kebijakan. Tanpa adanya SDM yang memadai, suatu program atau kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan kualitas kinerja SDM tersebut akan berdampak pada keseluruhan program²⁷.

Hasil penelitian evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMG di Gampong Sapik menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan sumber daya

²⁵ Haris, Adilah, and Laksana, "TIGA STRATEGI KOMUNITAS GENKOMPAK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING GENERASI MUDA."

²⁶ Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*.

²⁷ SOUTH SULAWESI PROVINCE, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara" (2015).

telah tercapai dengan baik. Dari segi jumlah, jumlah pegawai BUMG sudah memadai, dan penempatan mereka pada posisi masing-masing memastikan bahwa setiap anggota dapat melaksanakan tugasnya tanpa tumpang tindih tanggung jawab. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dinilai baik karena setiap anggota memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Pelatihan yang diberikan kepada pengurus BUMG dari kecamatan juga membantu meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, dari segi sumber dana, penelitian menunjukkan bahwa modal BUMG hanya berasal dari dana gampong. Meskipun modal tersebut telah digunakan secara efisien untuk membangun beberapa fasilitas pendukung di bidang pariwisata dan penyewaan alat musik, namun keterbatasan sumber dana masih menjadi masalah yang harus diatasi.

Observasi menunjukkan bahwa unit usaha alat musik pesta mengalami keterbatasan fasilitas, hanya memiliki sound dan keyboard karena terbatasnya modal. Hal ini menghambat perkembangan program BUMG di bidang alat musik. Untuk mengatasi keterbatasan sumber dana, BUMG sedang mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan direktur BUMG. Rencana kerjasama ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan sumber dana dan mengatasi kendala yang dihadapi BUMG, terutama dalam mengembangkan program di bidang alat musik pesta.

Evaluasi efisiensi dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber

daya dan dana yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan program-program BUMG²⁸. Perlu adanya langkah-langkah strategis dalam mengelola sumber daya dan dana agar efisiensi dapat ditingkatkan. Dalam konteks ini, BUMG Sapik perlu terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, dan mencari alternatif pendanaan agar dapat mengoptimalkan efisiensi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, BUMG Sapik dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di Gampong Sapik.

Kecukupan (adequacy)

Evaluasi kebijakan menyoroti sejauh mana efektivitas kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang dapat memunculkan masalah. Kriteria kecukupan, yang dijelaskan oleh Dunn²⁹, menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, perhatian peneliti lebih difokuskan pada upaya organisasi pelaksana, terutama Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dalam mempromosikan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pemberdayaan melalui BUMG di Gampong Sapik masih menunjukkan kekurangan dalam kriteria kecukupan. Terlihat dari partisipasi masyarakat yang terbatas, dengan hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar peduli terhadap BUMG. Sebaliknya, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli atau menolak untuk berpartisipasi dalam program BUMG. Beberapa di antaranya masih menolak

²⁸ Dendhi Agung Nugroho, "Evaluasi Penerapan Dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7, no. 2 (2015): 79–84.

²⁹ Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*.

keberadaan BUMG dengan pola pikir yang masih primitif, menganggap bahwa BUMG hanya dimiliki oleh pemerintah dan hanya untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka lebih memilih untuk tetap mengandalkan kegiatan pertanian sebagai sumber utama penghasilan.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dan BUMG dalam memperkenalkan BUMG kepada masyarakat masih terbatas pada kegiatan sosialisasi. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, namun tidak secara rutin dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kriteria kecukupan dalam evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui BUMG.

Salah satu saran perbaikan yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dengan menjadikannya sebagai kegiatan rutin setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas informasi dan memastikan bahwa masyarakat selalu terinformasi tentang program-program BUMG. Sosialisasi yang dilakukan juga perlu lebih mendalam dan komprehensif, melibatkan dialog dua arah antara BUMG dan masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya pendekatan yang lebih personal untuk memahami masyarakat tentang manfaat yang dapat diperoleh dari program BUMG.

Pendekatan langsung kepada masyarakat juga dapat membantu mengubah pola pikir yang masih meragukan keberadaan BUMG. BUMG perlu melakukan pendekatan yang bersifat inklusif, memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat secara

langsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat secara perlahan-lahan menerima dan memahami bahwa BUMG bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan milik bersama yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka. Dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kriteria kecukupan, BUMG di Gampong Sapik dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dengan lebih efektif. Melibatkan masyarakat secara aktif dan mengubah persepsi mereka terhadap BUMG akan menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kecukupan kebijakan pemberdayaan yang diimplementasikan oleh BUMG.

Perataan (equity)

Dalam konsep evaluasi kebijakan, kriteria perataan (equity) menjadi bagian yang penting dan berkaitan dengan aspek rasionalitas legal dan sosial. Menurut Dunn³⁰, perataan mengacu pada distribusi akibat dan usaha di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Sebuah kebijakan dikatakan berorientasi pada perataan ketika distribusi manfaatnya dianggap adil³¹. Kriteria perataan erat kaitannya dengan ide keadilan atau kewajiban dalam mendistribusikan sumber daya di masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), organisasi pelaksana harus memastikan bahwa pelayanan diberikan secara merata tanpa membedakan status sosial masyarakat Gampong Sapik, yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

Pada tanggal 13 September 2023, peneliti melakukan pengamatan terhadap

³⁰ Ibid.

³¹ Alfian Eikman and Mala Vinuzia, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di DesaTua Nanga

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 3 (2020).

berbagai kegiatan masyarakat dalam program BUMG. Pengamatan tersebut menunjukkan variasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Beberapa aktivitas yang diamati antara lain:

1. Penjualan Makanan/Minuman:

Sebagian masyarakat terlibat dalam kegiatan berjualan makanan/minuman melalui kios yang disewakan oleh BUMG. Aktivitas ini menunjukkan adanya partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat dalam program BUMG.

2. Petugas Kebersihan:

Masyarakat yang bertugas sebagai petugas kebersihan terlibat dalam kegiatan membenahi lokasi pariwisata. Mereka membatasi rumput liar, memperhatikan tanaman, dan secara aktif menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung aspek kebersihan dan estetika wilayah tersebut.

3. Pemain dan Penyanyi Alat Musik Pesta:

Selain itu, peneliti juga mengamati kegiatan para pemain dan penyanyi alat musik pesta di Gampong. Mereka terlibat dalam aktivitas mereka masing-masing, memberikan kontribusi positif dalam menyediakan hiburan dan suasana meriah.

Semua masyarakat yang berpartisipasi dalam program BUMG mendapatkan pelayanan yang merata. Dalam konteks ini, BUMG memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk

memilih dan berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang dan manfaat yang diberikan oleh program pemberdayaan. Namun, kendati terdapat upaya untuk mencapai perataan dalam pelaksanaan kebijakan³², peneliti juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mungkin memengaruhi perataan tersebut. Misalnya, bagaimana distribusi pelayanan di antara kelompok masyarakat yang berpartisipasi, serta sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menciptakan kesetaraan akses dan manfaat di tengah diversitas masyarakat. Evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan pemberdayaan ini dalam mencapai tujuan perataan yang diinginkan.

Responsivitas (responsiveness)

Responsivitas (responsiveness) dalam konteks kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan ukuran sejauh mana kebijakan tersebut mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Menurut Dunn³³, kriteria responsivitas menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kebijakan, dan aspek-aspek lain seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan akan kurang bermakna jika kebijakan tersebut tidak mampu merespons kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Dalam implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Sapik, Aceh

³² Nugroho, "Evaluasi Penerapan Dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan

Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)."

³³ Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*.

Selatan, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh BUMG menjadi bagian integral dari responsivitas kebijakan tersebut. Fasilitas ini, didanai oleh modal yang bersumber dari dana gampong, difungsikan untuk mendukung berbagai bidang usaha yang dikelola oleh BUMG.

Adanya sarana prasarana seperti kios, tempat duduk, ayunan, relief ulos, gapura hariara punsu, spot foto, dan tempat sampah di bidang pariwisata, serta fasilitas sound dan keyboard di bidang alat musik, menciptakan fondasi fisik untuk berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa responsivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMG dapat dikatakan kurang baik, terutama terlihat dari fasilitas yang dimiliki oleh BUMG. Fasilitas fisik, yang merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program, memainkan peran krusial dalam menyediakan sarana yang diperlukan untuk setiap aktivitas. Terlebih lagi, penelitian menunjukkan bahwa fasilitas di bidang pariwisata seperti kios, ayunan, tempat duduk, relief ulos, gapura hariara punsu, tempat sampah, dan spot photo telah mencapai tingkat kelayakan yang memadai. Namun, terdapat catatan pada tingkat pengembangan fasilitas tersebut, dimana sebagian fasilitas sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Selain itu, di bidang alat musik, fasilitas yang tersedia masih sangat kurang memadai. Keterbatasan alat musik, terutama hanya adanya keyboard dan sound, menyebabkan BUMG dianggap belum memenuhi standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Penyebab utama dari keterbatasan ini adalah minimnya modal yang tersedia. Walaupun demikian, hal ini tidak mengurangi semangat para organisasi pelaksana, yang terus berusaha

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. BUMG berkomitmen untuk melayani masyarakat sebaik mungkin dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengkonfirmasi bahwa kendala utama yang dihadapi oleh BUMG adalah keterbatasan sumber dana, yang saat ini hanya bersumber dari dana gampong. Oleh karena itu, kriteria responsivitas, yang mencerminkan kemampuan kebijakan untuk merespons kebutuhan aktual masyarakat, tampak kurang baik dan memerlukan peningkatan. Untuk meningkatkan responsivitas kebijakan, BUMG mengusulkan rencana kerjasama dengan pihak ketiga. Rencana ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, terutama dalam memperluas fasilitas di bidang alat musik. Implementasi rencana kerjasama ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan BUMG Sapik dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat setempat. Melalui sinergi dengan pihak ketiga, BUMG berharap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas yang disediakan, khususnya di bidang alat musik. Responsivitas kebijakan ini akan semakin terwujud dengan baik ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari adanya fasilitas yang lebih lengkap dan berkualitas. Dengan demikian, BUMG Sapik diharapkan semakin jaya dan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar pada pemberdayaan masyarakat di Gampong Sapik, Aceh Selatan.

Ketepatan (appropriateness)

Ketepatan (appropriateness)

merupakan salah satu kriteria yang dekat kaitannya dengan rasionalitas substantif, di mana aspek ini tidak hanya berkaitan dengan satu kriteria individu, tetapi melibatkan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Dunn³⁴ menguraikan bahwa ketepatan mengevaluasi nilai atau harga dari tujuan-tujuan program, serta seberapa kuat dasar asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Pertanyaan mendasar dalam konteks ketepatan kebijakan adalah apakah kebijakan yang dibuat telah menargetkan dengan benar dan telah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasarannya atau tidak. Dalam implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Sapik Aceh Selatan, fokus utamanya adalah pada sejauh mana program yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini, melalui wawancara menunjukkan bahwa program dan bidang usaha yang dikelola oleh BUMG sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gampong Sapik. Namun, peneliti tertarik untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BUMG Sapik. Wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMG mengindikasikan bahwa semua pihak menyambut baik kebijakan ini. Program dan bidang usaha yang dikelola oleh BUMG dianggap memberikan dampak positif dan manfaat yang cepat serta tepat bagi masyarakat. Evaluasi dari dua bidang masyarakat yang terlibat dalam kebijakan ini menunjukkan adanya peningkatan sumber penghasilan dan kemudahan dalam mengembangkan usaha produktif dengan harga sewa yang relative murah. Penting untuk dicatat bahwa dampak positif ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sebelum BUMG Sapik didirikan, di mana sebagian

besar masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian. Bahkan dalam tahap pengembangan, BUMG Sapik sudah memberikan sedikit manfaat bagi masyarakat yang terlibat. Masyarakat yang tidak langsung terlibat dalam program BUMG, seperti yang memiliki homestay, juga merasakan dampak positif karena jumlah wisatawan yang datang berkunjung meningkat, mengakibatkan homestay di sana menjadi lebih laku.

Pengoptimalan potensi manfaat ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk mendukung pengembangan BUMG. Perbaikan infrastruktur dalam sektor alat musik dan peningkatan sektor pariwisata menjadi faktor penting untuk meningkatkan dampak yang dihasilkan oleh BUMG Sapik bagi masyarakat Gampong Sapik. Wisata Sapik sebagai aset yang dimiliki oleh Gampong tersebut memiliki potensi nilai jual yang tinggi, terutama dengan keindahan pemandangan dari spot pariwisata BUMG.

Sejumlah besar wisatawan yang datang ke sana, termasuk melakukan sesi foto prewedding, menunjukkan potensi yang besar. Masyarakat juga turut berkontribusi dengan menyediakan fasilitas di kios-kios mereka, seperti meja, kursi, tikar, dan peralatan musik, untuk menarik minat pengunjung. Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh BUMG, seperti penyediaan fasilitas di kios, speaker, katon, dan gitar, menciptakan suasana yang menarik untuk pengunjung.

Evaluasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima pelayanan dari BUMG merasa cukup puas dan memberikan respon positif. Kepuasan

³⁴ Ibid.

masyarakat ini tidak terlepas dari upaya para penanggung jawab kebijakan, seperti Kepala Gampong dan Direktur BUMG, yang terus berkoordinasi dalam melakukan pengawasan. Sinergi yang baik memungkinkan pelayanan berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan kebijakan yang cepat saat terjadi permasalahan. Inisiatif dan komitmen tinggi dari pihak BUMG untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sumber daya yang ada juga memberikan kontribusi positif dalam memastikan dampak positif bagi masyarakat Gampong Sapik.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap kriteria ketepatan menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMG di Gampong Sapik telah mencapai tingkat yang cukup baik. Program dan bidang usaha yang dibentuk telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam menghadapi kendala sumber daya, BUMG telah menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Gampong Sapik. Sinergi antara BUMG, pemerintah gampong, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengoptimalkan kolaborasi ini guna meningkatkan kualitas dan dampak positif kebijakan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum mencapai tingkat optimal. Pengalaman ini tercermin dari tingkat

partisipasi masyarakat yang rendah dan kekurangan fasilitas di setiap unit usaha, yang disebabkan oleh keterbatasan dana. Hal tersebut perlu dievaluasi dari berbagai aspek yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan,

Dari beberapa aspek tersebut dapat diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini telah terjadi perubahan positif di masyarakat gampong setelah BUMG hadir. Dampaknya terlihat dalam perubahan ekonomi masyarakat, menunjukkan bahwa BUMG memberikan sumbangan yang positif. Perbandingan antara masa sebelum dan setelah BUMG menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Peran BUMG tidak hanya berfokus pada meningkatkan ekonomi, tetapi juga mengembangkan bakat dan potensi masyarakat.

Program-program yang dijalankan oleh BUMG memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai bidang untuk membuat diri mereka berdaya. Kesempatan yang didapatkan tersebut yaitu keterbukaan tiap anggota masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, mengarahkan bakat, dan meningkatkan sumber pendapatan. Sehingga sedikit demi sedikit masyarakat yang benar-benar mendapat keematan serta mengambil kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya bisa sejahtera di kemudian hari.

Kendati modal awal BUMG terbatas, terutama dari sumber dana gampong dan fasilitas yang terbatas, hal ini tidak menghambat kelangsungan operasional BUMG. Pengurus BUMG menunjukkan semangat tinggi dan bahkan berencana menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan sumber modal. Selain modal, penelitian ini menemukan bahwa SDM yang bekerja dalam organisasi BUMG

telah beroperasi secara efisien. Pengurus BUMG memegang peran yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan telah menjalankan tugas dengan baik. Pelatihan dan diklat yang diberikan oleh pihak kecamatan setelah pemilihan pengurus BUMG juga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas kinerja pegawai BUMG. Dengan demikian, aspek sumber daya manusia di BUMG dinilai efektif dan berkualitas.

Dalam hal pelayanan, tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh BUMG dinilai merata dan setiap warga gampong mendapatkan hak yang sama. Hal ini mencerminkan kesetaraan dalam akses masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dikelola oleh BUMG. Terakhir, penelitian menunjukkan bahwa program dan sektor usaha yang dijalankan oleh BUMG sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif, yang membantu meningkatkan sumber penghasilan mereka selain dari sektor pertanian. Terkait penyewaan alat musik, meskipun belum sepenuhnya tersedia, BUMG memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan acara kecil-kecilan dengan menyediakan layanan sewa alat musik dengan harga yang terjangkau.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala seperti minimnya partisipasi dan keterbatasan dana, BUMG memberikan dampak positif pada masyarakat gampong, terutama dalam hal peningkatan ekonomi dan pengembangan potensi masyarakat. Upaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta efisiensi dalam sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi BUMG. Rekomendasi lebih lanjut dapat diarahkan pada peningkatan modal, peningkatan

partisipasi masyarakat, dan penguatan sumber daya manusia agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Edi, Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Jakarta: PT Refika Aditama, 2009.
- Eikman, Alfian, and Mala Vinuzia. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 3 (2020).
- Haris, Muhammad. "Problematisa Pemberdayaan Masyarakat Miskin." *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (2019): 46–63.

- Haris, Muhammad, Ananda Refiona Adilah, and Bayu Indra Laksana. "TIGA STRATEGI KOMUNITAS GENKOMPAK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING GENERASI MUDA." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2023): 123–133.
- Haris, Muhammad, Alifiya Putri, and Moralely Hendrayani. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)." *Dakwatul Islam* 8, no. 1 (2023): 24–38.
- . "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)." *Dakwatul Islam* 8, no. 1 (2023): 24–38.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. 6th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- . *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Mas'od, M Mochtar, Ahmad Maulana Anshori, Teguh Ansori, Muhammad Haris, and Malik Ibrahim. "EFEKTIFITAS KOMUNIKASI PNPM MANDIRI DENGAN PEMANFATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PADANG." *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 8 (2023): 262–282.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nugroho, Dendhi Agung. "Evaluasi Penerapan Dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7, no. 2 (2015): 79–84.
- Pitana, I Gde. *Pemberdayaan Dan Hiperdemokrasi Dalam Pembangunan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2011.
- PROVINCE, SOUTH SULAWESI. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara" (2015).
- Purnamasari, Hanny, and Rachmat Ramdani. "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 2 (2019): 136–149.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Supardi. *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta: UAI Press, 2019.

Winarmo, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Yefni, Yefni, Muhammad Haris, and Riski Umi Pratiwi.
“PEMBERDAYAAN KAWASAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KOTA PEKANBARU.”
Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat 4, no. 2 (n.d.): 61–73.